

Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Gaspol : Perempuan Pekerja Ojek Online Di Surabaya

Shinta Dwi Febia Kumalasari¹, Shofia Rosyida², Nabila Nur Aysyah³, dan Agus Widiyarta⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

E-mail: shintadwi725@gmail.com, shofiarosyida214@gmail.com,
nabilanuraysyah@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan ekonomi digital telah membuka peluang kerja bagi perempuan sebagai pengemudi ojek online, namun mereka masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan keterampilan, kerentanan sosial, dan minimnya akses pengembangan kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan perempuan melalui Program GASPOL (Gerakan Sayang Pekerja Ojek Online) bagi pekerja ojek online perempuan di Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data model Miles dan Huberman serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GASPOL telah berjalan cukup baik dalam mendukung pemberdayaan perempuan pekerja ojek online di Surabaya. Aspek komunikasi dilakukan melalui koordinator komunitas dan grup WhatsApp, sumber daya didukung tenaga pendamping profesional dan fasilitas pelatihan yang memadai meskipun anggaran masih terbatas, disposisi menunjukkan adanya komitmen pelaksana dan antusiasme peserta, serta struktur birokrasi berjalan cukup terkoordinasi. Meskipun demikian, perluasan jangkauan informasi dan peningkatan kapasitas program masih diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh pekerja ojek online perempuan di Kota Surabaya.

Kata kunci : *Pemberdayaan Perempuan, Implementasi Kebijakan, Program GASPOL, Pekerja Ojek Online Perempuan*

ABSTRACT

The growth of the digital economy has opened up employment opportunities for women as online motorcycle taxi drivers; however, they still face various challenges, such as limited skills, social vulnerability, and a lack of access to capacity-building opportunities. This study aims to analyze the empowerment of women through the GASPOL Program (Movement to Support Online Motorcycle Taxi Workers) for female online motorcycle taxi workers in the city of Surabaya. The study employs a descriptive qualitative approach using George C. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, with data analysis following the Miles and Huberman model and source triangulation. The research results indicate that the implementation of the GASPOL Program has been quite successful in supporting the empowerment of female online motorcycle taxi workers in Surabaya. The communication aspect was carried out through community coordinators and WhatsApp groups; resources were supported by professional facilitators and adequate training facilities despite limited budgets; dispositions showed the commitment of implementers

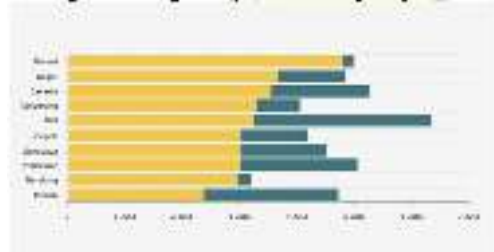
and the enthusiasm of participants; and the bureaucratic structure functioned in a fairly coordinated manner. Nevertheless, expanding the reach of information and enhancing the program's capacity remain necessary so that the program's benefits can be felt more widely by female online motorcycle taxi workers in the city of Surabaya.

Keyword : *Women's Empowerment, Policy Implementation, GASPOL Program, Female Online Motorcycle Taxi Drivers.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya ekonomi digital yang mengubah struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Model kerja berbasis platform ekonomi menghadirkan fleksibilitas sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Di sektor transportasi, perusahaan seperti Gojek dan Grab menjadi pionir dalam menghadirkan layanan ojek online yang kini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan transportasi online tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi alternatif sumber penghasilan bagi kelompok usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan data dari asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua, jumlah pengemudi ojek online di Indonesia telah mencapai lebih dari 4 juta orang yang tersebar di berbagai daerah (Mursalina et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa jutaan masyarakat memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi sebagai peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan.



Gambar 1. Peningkatan Pendapatan Pengemudi Ojek Online Tahun 2025
Sumber: Databoks, 2025

Dalam tabel tersebut, di ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, terlihat bahwa pendapatan pengemudi

ojek online mengalami peningkatan setelah bergabung sebagai mitra aplikasi, dari kisaran sekitar 3 juta rupiah menjadi sekitar 4 hingga 4,5 juta rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi berbasis digital mampu memberikan tambahan penghasilan yang cukup signifikan, sehingga menjadi satu alternatif pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor transportasi berbasis digital memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perkotaan, sekaligus menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat, termasuk perempuan.

Perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online tidak selalu didorong oleh pilihan yang sepenuhnya bebas, melainkan sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi. Keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya keterampilan untuk memasuki sektor pekerjaan lain menyebabkan sebagian perempuan memilih pekerjaan tersebut sebagai alternatif untuk memperoleh penghasilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Saparinah dalam (Shabrina & Sarmini, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong perempuan menjadi sosok yang mandiri, antara lain kondisi sosial-ekonomi yang tidak berkecukupan, dorongan tradisi dalam masyarakat yang menuntut perempuan untuk mampu bertahan dan mandiri, serta latar belakang pengalaman dan pendidikan yang dimiliki.

Salah satu bentuk perwujudan kemandirian tersebut dapat terlihat pada perempuan yang memutuskan bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun,

dalam menjalankan pekerjaan tersebut perempuan juga menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan. Mereka menghadapi berbagai risiko, mulai dari potensi tindak kekerasan di jalan, pelecehan seksual, hingga terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial (Ramadiansyah & Sholichah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan menjadi pengemudi ojek online pada dasarnya sering kali muncul karena keterpaksaan akibat terbatasnya alternatif pekerjaan yang tersedia bagi perempuan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi penting untuk mendorong perempuan tidak hanya bertahan sebagai pengemudi ojek online, tetapi juga menjadi perempuan yang berdaya melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, serta peluang usaha yang lebih berkelanjutan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di luar sektor pekerjaan tersebut.

Situasi tersebut menuntut adanya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di sektor informal digital. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program GASPOL (Gerakan Sayang Pekerja Ojek Online) berupaya meningkatkan kapasitas, perlindungan, dan kemandirian ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, serta penguatan jejaring. Program ini juga didukung oleh kebijakan daerah, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender serta memperkuat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan perempuan memperoleh

kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, peluang ekonomi, serta perlindungan dalam dunia kerja.

Dalam konteks implementasi di tingkat daerah, penting untuk melihat bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan dijalankan pada wilayah dengan dinamika ekonomi yang tinggi. Salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji adalah Surabaya sebagai kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang intens. Fenomena ini juga terlihat di Surabaya, di mana Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mencatat adanya 246 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya (Surabaya, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor transportasi berbasis digital telah menjadi bagian nyata dari struktur ekonomi perkotaan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang terdiri dari empat fokus dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Fauzan, 2024). Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan perempuan melalui Program GASPOL bagi pekerja ojek online perempuan di Surabaya berdasarkan empat fokus utama menurut Edwards III. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik berbasis gender serta menjadi bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

2. LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan, karena pada tahap inilah suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

a. Komunikasi (communication).

Menurut George C. Edwards III, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang efektif hanya dapat terwujud apabila para pengambil keputusan (decision-makers) memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Pemahaman tersebut dapat tercapai jika proses komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan aturan pelaksanaannya dapat disampaikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, informasi yang dikomunikasikan harus bersifat jelas, akurat, dan konsisten.

b. Sumber daya (resources)

Sumber daya merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa indikator untuk menilai kecukupan sumber daya yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.

Disposisi merupakan faktor penting karena keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada pemahaman dan kemampuan, tetapi juga pada kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berperan dalam menentukan apakah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif atau tidak. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memiliki kemampuan serta kemauan, kelemahan dalam struktur organisasi dapat menjadi penghambat.

Kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi yang baik antar unit kerja agar pelaksanaan dapat berjalan lancar.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan George C.

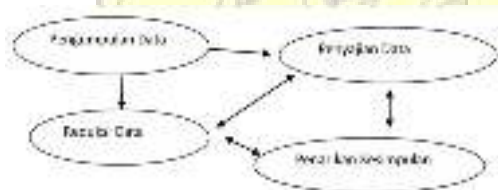
Edward III digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program GASPOL bagi pekerja ojek online perempuan di Surabaya, dengan melihat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. METODOLOGU

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell dalam (Radianto, 2023) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok terhadap masalah sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan perempuan melalui program GASPOL bagi pekerja ojek online perempuan di Surabaya, serta menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif para pelaksana dan kelompok sasaran. Model deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi di lapangan.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III, yang menekankan empat fokus utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat fokus tersebut dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana Program GASPOL dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam memberdayakan pekerja ojek online perempuan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Surabaya dengan mempertimbangkan daerah yang memiliki jumlah pekerja ojek online perempuan yang cukup signifikan serta menjadi sasaran pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini informan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu terdiri dari pihak pelaksana program serta pekerja ojek online perempuan sebagai penerima manfaat program. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan terkait pengalaman, pandangan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan program di lapangan, sementara dokumentasi digunakan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, serta peraturan yang berkaitan dengan Program GASPOL.



Gambar 2. Model Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar temuan di lapangan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap dan terus dilakukan proses verifikasi sepanjang penelitian untuk menjamin validitas serta konsistensi data yang diperoleh. Menurut Sugiyono dalam (Nurfajriani et al., 2024) Triangulasi sumber adalah teknik pengujian

keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber melalui proses pengecekan silang antar sumber, sehingga dapat memastikan kesesuaian, konsistensi, dan kebenaran data yang diperoleh. Melalui perbandingan hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan perempuan melalui Program GASPOL bagi pekerja ojek online perempuan di Surabaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi Program GASPOL di Kota Surabaya. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi antara pihak penyelenggara dengan peserta program agar tujuan, mekanisme, jadwal pelaksanaan, serta tahapan kegiatan dapat dipahami dengan baik. Komunikasi yang jelas, tepat, dan konsisten akan mempermudah peserta mengikuti program secara optimal. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program GASPOL.

Komunikasi dalam Program GASPOL dilakukan melalui koordinator komunitas ojek online perempuan yang kemudian menyampaikan informasi kepada anggota melalui grup WhatsApp komunitas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bu Hana yang menyatakan bahwa: "Informasi terkait pelaksanaan Program GASPOL kami sampaikan secara bertahap kepada peserta melalui koordinator komunitas, sehingga peserta

dapat memahami jadwal dan mekanisme kegiatan dengan lebih mudah.”

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan secara terstruktur sehingga informasi lebih mudah diterima oleh peserta. Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Hendra yang menyatakan bahwa: “Koordinator menjadi penghubung utama antara DP3AK dan peserta sehingga informasi dapat diterima secara langsung dan lebih mudah dipahami.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koordinator komunitas membantu kelancaran penyampaian informasi. Selain itu, peserta juga dapat bertanya secara langsung apabila terdapat informasi yang belum dipahami. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lilik: “Kalau ada informasi pelatihan biasanya langsung diberitahu lewat grup, dan kalau belum jelas bisa langsung tanya ke koordinator.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana komunikasi dalam Program GASPOL dilakukan melalui koordinator komunitas dan grup WhatsApp untuk mempermudah penyampaian informasi kepada peserta. Pemanfaatan media digital terbukti membantu peserta memperoleh informasi secara cepat dan mudah dipahami. Selain itu, keberadaan koordinator komunitas juga memperkuat komunikasi secara langsung sehingga peserta dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan program. Sistem komunikasi dua arah tersebut membantu meminimalisasi kesalahpahaman serta mendukung kelancaran implementasi Program GASPOL sebagai program pemberdayaan perempuan bagi pekerja ojek online di Kota Surabaya.

Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi Program GASPOL. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, dukungan anggaran, fasilitas pelatihan, serta sarana pendukung lainnya.

Ketersediaan sumber daya yang memadai akan membantu pelaksanaan program berjalan efektif. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Pak Fajar menjelaskan bahwa: “Dinas sudah ada anggaran khusus untuk pelaksanaan Program GASPOL. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal menjadi kendala sehingga jumlah pelatihan dan kuota peserta masih terbatas.”

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dukungan anggaran memang tersedia, tetapi belum cukup untuk menjangkau seluruh pekerja ojek online perempuan yang membutuhkan pelatihan. Keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah kelas dan kuota peserta masih terbatas.

Dari sisi sumber daya manusia, Program GASPOL didukung oleh tenaga pendamping dan instruktur profesional. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Hendra: “Tenaga pendamping yang terlibat berasal dari mitra profesional sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik.”

Selain itu, fasilitas pelatihan dinilai cukup memadai. Ibu Andi Maria menyampaikan bahwa: “Seluruh kebutuhan pelatihan telah disiapkan oleh dinas, mulai dari bahan praktik sampai tempat pelaksanaan.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam Program GASPOL sudah cukup mendukung melalui kerja sama dengan mitra profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang pelatihan. Selain itu, fasilitas pelatihan yang disediakan juga mampu menunjang peserta dalam mengikuti kegiatan secara optimal. Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam memperluas jangkauan program. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai penelitian implementasi kebijakan yang menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan sering kali menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai agar Program GASPOL dapat menjangkau lebih banyak pekerja ojek online perempuan dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan perempuan di Kota Surabaya.

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Disposisi yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi program. Dalam Program GASPOL, disposisi dapat dilihat dari komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.

Pak Hendra menyampaikan bahwa: "Kalau dilihat dari kontinuitas dari tahun ke tahun ya harusnya kita tetap komit untuk memberdayakan perempuan ini karena memang sudah menjadi tugas dan fungsi kami."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen kuat dalam menjalankan program. Pelaksana memahami bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan sehingga pelaksanaan program harus terus berjalan.

Disposisi pelaksana juga terlihat dari kepedulian mereka terhadap kebutuhan peserta. Pak Hendra menjelaskan bahwa: "Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, misalnya peserta tertarik bikin buket snack karena lebih mudah dijual."

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga berusaha memastikan manfaat program sesuai kebutuhan peserta. Di sisi lain, peserta juga menunjukkan disposisi yang positif. Salah satu peserta menyampaikan bahwa: "Yang ini nggak bayar, aku dapat ilmu. Memang harus ada yang dikorbankan, tapi nggak apa-apa karena kita ngambil ilmunya."

Pernyataan tersebut menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti

pelatihan meskipun harus membagi waktu dengan pekerjaan. Sikap positif peserta ini mendukung keberhasilan implementasi program.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa disposisi dalam implementasi Program GASPOL menunjukkan adanya sikap yang saling mendukung antara pelaksana dan peserta program. Pelaksana menunjukkan komitmen, kepedulian, dan responsivitas yang tinggi terhadap pelaksanaan program, sedangkan peserta menunjukkan antusiasme, keterlibatan aktif, serta kemauan untuk berkembang melalui pelatihan yang diberikan. Temuan ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Ketika implementor memiliki komitmen yang tinggi dan kelompok sasaran menerima program dengan baik, maka implementasi kebijakan cenderung berjalan lebih efektif.

Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Struktur birokrasi yang jelas akan membantu pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan efektif. Dalam Program GASPOL, DP3AK berperan sebagai pelaksana utama yang bekerja sama dengan komunitas ojek online perempuan serta instruktur pelatihan. Pak Hendra menjelaskan bahwa: "Dari pihak kami tugasnya menyiapkan dan mengidentifikasi calon peserta, kemudian dilakukan asesmen awal."

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program. DP3AK bertanggung jawab pada proses pendataan dan seleksi peserta agar program tepat sasaran.

Koordinasi dengan komunitas juga menjadi bagian penting dari struktur birokrasi. Bu Hana menyampaikan bahwa: “Informasi Program GASPOL disampaikan melalui koordinator komunitas yang kemudian meneruskannya kepada anggota.”

Hal ini menunjukkan adanya pola komunikasi birokrasi yang terstruktur sehingga informasi dapat diterima lebih cepat oleh peserta. Selain itu, prosedur pendaftaran peserta juga cukup jelas. Ibu Andi Maria menyampaikan bahwa: “Peserta biasanya diminta mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, lalu diseleksi sesuai kuota pelatihan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Program GASPOL memiliki mekanisme administrasi yang sistematis. Dengan adanya prosedur yang jelas, pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program GASPOL telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui adanya pembagian tugas yang jelas antara DP3AK, komunitas pengemudi ojek online, instruktur pelatihan, serta pihak pendukung lainnya. Selain itu, koordinasi melalui koordinator komunitas, prosedur pendataan peserta, mekanisme seleksi, serta kejelasan informasi pelatihan menunjukkan bahwa implementasi program telah memiliki pola birokrasi yang cukup terstruktur. Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dapat mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Dengan adanya koordinasi lintas pihak dan prosedur yang terarah, Program GASPOL dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan pekerja ojek online di Kota Surabaya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program GASPOL bagi pekerja ojek online perempuan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Program ini memberikan manfaat melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan peserta, baik untuk meningkatkan kapasitas diri maupun membuka peluang usaha tambahan yang dapat menunjang kesejahteraan ekonomi keluarga. Program ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kemampuan adaptif perempuan pekerja sektor informal terhadap tantangan ekonomi

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan secara terarah melalui koordinator komunitas dan grup WhatsApp. Mekanisme ini mempermudah peserta dalam memperoleh informasi terkait jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan kegiatan program. Namun, jangkauan informasi masih belum sepenuhnya merata karena penyebaran informasi lebih terbatas sehingga belum seluruh pekerja ojek online perempuan dapat mengakses program secara optimal.

Pada aspek sumber daya, pelaksanaan Program GASPOL telah didukung oleh tenaga pendamping profesional, fasilitas pelatihan yang memadai, serta sarana pendukung yang cukup menunjang kelancaran kegiatan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan yang berdampak pada kapasitas pelaksanaan program, terutama dalam jumlah kelas pelatihan dan kuota peserta yang masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara merata oleh pekerja ojek online perempuan.

Pada aspek disposisi, pelaksana program terdapat komitmen, kepedulian, dan responsivitas dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Sikap ini terlihat dari upaya penyesuaian materi pelatihan

sesuai kebutuhan peserta serta pendampingan yang diberikan selama pelaksanaan program. Di sisi lain, peserta juga menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dalam mengikuti kegiatan, serta memiliki motivasi untuk memanfaatkan keterampilan yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi.

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi program telah memiliki pembagian tugas yang jelas antara pihak DP3AK, komunitas pengemudi ojek online perempuan, tenaga pendamping, dan pihak pendukung lainnya. Koordinasi yang dilakukan melalui koordinator komunitas serta adanya prosedur pendaftaran yang mudah dan tidak berbelit-belit sertaseleksi peserta menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara cukup terstruktur dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Program GASPOL telah menjadi salah satu bentuk kebijakan pemberdayaan perempuan yang cukup efektif bagi pekerja ojek online perempuan di Kota Surabaya. Namun, penguatan pada aspek perluasan jangkauan informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan program masih diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas dan merata.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur beserta para pelaksana Program GASPOL yang telah memberikan izin, informasi, dan

data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada para pekerja ojek online perempuan di Kota Surabaya yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman selama proses pengumpulan data. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>
- Mursalina, A., Milda, A., Musa, D. T., Alamri, A. R., & Marini, M. (2023). Perempuan Driver Ojek Online Bentuk Kesetaraan Gender di Pontianak. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(2), 146–158.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Radianto, E. (2023). Interpretasi Modern tentang Teori dan Filosofis Penelitian. *Kritis*, 32(1), 56–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1p56-74>
- Ramadiansyah, M. R., & Sholichah, N. (2025). Evaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan di Kota Surabaya.
Soetomo Administrasi Publik, 3(1),
226– 240.

Shabrina, A. A., & Sarmini. (2021).
Konstruksi Sosial Kemandirian
Perempuan di Era Globalisasi (Studi
Fenomenologi Perempuan
Pengemudi Ojek Online di Kota
Surabaya). *Kajian Moral Dan
Kewarganegaraan.*, 11(2), 398–
412.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n2.p398-412>

Pemerintah Kota Surabaya. (2022).
*Tingkatkan Ekonomi Keluarga,
Pemkot Surabaya Beri Pelatihan
dan Fasilitasi 246 Pengemudi Ojol
Perempuan.* Pemerintah Kota
Surabaya.

<https://surabaya.go.id/id/berita/11516/tingkatkan-ekonomi-keluarga-pemkot-surabaya-beri-pelatihan-dan-fasilitasi-246-pengemudi-ojol-perempuan>

